

Analisis Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value For Money* Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Studi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021)

Mirzan Hakiki¹ Eni Indriani² Adhitya Bayu Suryantara³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: hakikimirzan@gmail.com¹ eni.indriani@unram.ac.id² adhityabayus@unram.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money* atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep *value for money* terhadap kinerja dari program kerja yang telah dilaksanakan. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara. Metode pengambilan data yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan informan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa sudah transparan dengan adanya keterbukaan informasi dan sudah akuntabel pertanggungjawaban terhadap publik dan pemerintah sesuai dengan aturan. Dalam konsep *value for money*, dikatakan telah memenuhi prinsip *value for money* jika ada kegiatan yang memenuhi ketiga elemen *value for money* (ekonomis, efisien, dan efektif). Namun pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 belum memenuhi prinsip *value for money*. Karena pada kinerja tahun 2021 setelah dilakukan pengukuran semua kegiatan ada beberapa kegiatan yang sudah ekonomis dan juga efisien namun kegiatan tersebut tidak efektif.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, *Value for Money*, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kabupaten Lombok Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat. Sebagai kabupaten termuda di Nusa Tenggara Barat (NTB), kesediaan sarana dan prasarana masih relatif rendah dibandingkan kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Barat (NTB). Oleh sebab itu Kabupaten Lombok Utara hingga saat ini menjadi satu-satunya daerah dengan status tertinggal di Nusa Tenggara Barat (NTB). Permasalahan yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Lombok Utara saat ini yaitu pengembangan ekonomi wilayah yang masih tertinggal dipengaruhi oleh keterbatasan transportasi dan akses jalan dipengaruhi oleh kondisi wilayah yang sedikit sulit dilalui dan beberapa rusak, sehingga cukup sulit untuk menghubungkan wilayah desa tertinggal dengan wilayah yang relatif maju. Hal ini berpengaruh pada berbagai kegiatan ekonomi, sosial, politik, serta mobilitas penduduk yang masih rendah di Kabupaten Lombok Utara sehingga menjadi salah satu faktor tidak optimalnya pelaksanaan otonomi daerah (Anwar, 2021). Penyediaan jasa transportasi sangat penting dalam upaya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di bidang perhubungan. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah di bidang perhubungan. Dalam upaya pembangunan tersebut tentunya ada sasaran dan tujuan yang ingin dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban atas desentralisasi dan otonomi daerah sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dinas Perhubungan merupakan salah satu lembaga pemerintah sebagai pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah di bidang perhubungan sehingga dituntut prestasi kerja yang baik yaitu mampu secara optimal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara sebagai salah satu instansi pelaksana otonomi daerah bertugas untuk menyusun rencana kinerja dan melaksanakan program-program yang dapat menunjang pencapaian cita-cita otonomi daerah di Kabupaten Lombok Utara. Dari rencana kinerja dan program-program tersebut demi tercapainya Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pembangunan memerlukan transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menilai kinerja dan tanggungjawab dari organisasi sektor publik tersebut. Ismail (2018) menegaskan bahwa dalam sektor publik, "pertanggungjawaban merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin/pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta masyarakat".

Tinjauan Pustaka

Agency Theory

Teori Keagenan (*Agency Theory*) ini memaknai antara *principal* (pemilik) dengan agen (manajemen) yang dimana agen diberi amanah dan wewenang untuk mengurus, mengatur dan mengelola beberapa jasa untuk kepentingan mereka. Teori keagenan ini muncul ketika ada hubungan kerja antara satu orang atau lebih, prinsipal pemberi wewenang dan bekerja sama dengan orang lain (agen) untuk mendapatkan otoritas dalam menjalankan perusahaan. Agen wajib melapor dan memberikan informasi kepada prinsipal karena agen lebih mengetahui keadaan perusahaan daripada prinsipal (Zoebar & Miftah, 2020).

Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut (Mardiasmo, 2018) pemahaman mengenai kinerja instansi pemerintah dapat dilakukan dengan 2 pendekatan. Pertama dilihat dari perspektif birokrasi. Kedua dilihat dari perspektif kelompok yaitu dilihat dari sasaran organisasi dan pengguna jasa organisasi tersebut. Kinerja instansi pemerintah erat kaitannya dengan produktivitas, kualitas pelayanan, akuntabilitas, *responsibilities* dan *responsiveness*. Dengan demikian kinerja merupakan capaian hasil kerja dalam melaksanakan strategi, program dan kebijakan demi mencapai tujuan organisasi yang sudah dipaparkan dalam visi dan misi.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dapat diartikan sebagai suatu evaluasi terhadap instansi pemerintah mengenai kegiatan atau program yang telah dilaksanakan tolak ukur yang telah dibuat (standar minimum pelayanan publik) atau berdasarkan basis regular dan pelayan publik dalam rangka meningkatkan akuntabilitas publik (Laoli et al., 2019). Jadi pengukuran kinerja terbatas sebagai alat dalam menilai kinerja yang telah dilaksanakan. Penilaian atas pencapaian ini, dapat dijadikan tolak ukur dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja suatu organisasi kedepannya (Rahayu et al., 2017)

Transparansi

Menurut (Purnomo & Putri, 2018) transparansi merupakan mempertanggung jawabkan apa-apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi relevan, dan memberikan laporan seperti legislator, auditor, publik secara terbuka, dan kemudian dipublikasikan. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan yang dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Untuk pengukuran transparansi dalam penelitian ini akan digunakan indikator transparansi yang diadopsi dari (kristianten, 2006:73) antara lain: Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen; Kejelasan dan kelengkapan informasi; Keterbukaan proses

Akuntabilitas

Akuntabilitas apabila dikaitkan dengan organisasi pemerintahan, dapat diartikan sebagai suatu pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Pihak-pihak yang berkepentingan di sini yaitu para pemangku kepentingan (stakeholder). Selain itu, sebenarnya akuntabilitas publik juga berkaitan dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai aktivitas yang telah dilakukan, sedang dilakukan dan yang masih direncanakan oleh organisasi publik (Iswahyudi et al., 2016). Menurut (Santoso, 2013) Suatu organisasi publik dapat dikatakan akuntabel apabila memenuhi empat indikator akuntabilitas. Adapun keempat indikator akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan sudah cukup baik atau belum dalam menjalankan tugas, yang meliputi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.
3. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan sudah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas, atas kebijakan-kebijakan

Konsep Value for Money

Value for Money (VFM) merupakan konsep penting dalam organisasi publik. *Value for money* adalah inti dari pengukuran kinerja proyek sebuah organisasi pemerintah. Ukuran kinerja pemerintah dinilai dari segi input, output dan outcome, meskipun pengukuran yang diperlukan dapat ditambahkan, seperti distribusi dan cakupan layanan (Mardiasmo, 2018). Menurut (Shara et al., 2020) *Value for Money* merupakan prinsip pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya *input* paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Indikator Value for Money

Value for Money tinggi ketika ada keseimbangan optimal antara ketiga elemen, ketika biaya relatif rendah, produktivitas tinggi, dan hasil yang sukses telah dicapai (Trimarstuti,

2019). Indikator *value for money* dibagi menjadi dua bagian, yaitu (1) indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi), dan (2) indikator kualitas pelayanan (efektivitas) (Mardiasmo, 2018).

Langkah-langkah Pengukuran *Value for Money*

Tabel 1.

Indikator	Rumus	Klasifikasi
Ekonomis	$Ekonomis = \frac{Input}{Input\ Value}$ Keterangan: <i>Input</i> : Anggaran yang digunakan <i>Input Value</i> : Anggaran	- (X < 100%), maka artinya ekonomis. - (X = 100%), maka artinya ekonomis berimbang. - (X > 100%), maka artinya tidak ekonomis.
Efisiensi	$Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100\%$ Keterangan: <i>Output</i> : Hasil yang dicapai atas kebijakan program dan juga aktivitas <i>Input</i> : Anggaran (nilai masukan)	- (X < 100%), maka artinya tidak efisien. - (X = 100%), maka artinya efisien cukup seimbang. - (X > 100%), maka artinya efisien.
Efektivitas	$Efektivitas = \frac{Outcome}{Output} \times 100\%$ Keterangan: <i>Outcome</i> : Dampak dari sebuah program <i>Output</i> : Hasil yang dicapai atas kebijakan sebuah program	- (X < 100%), maka artinya tidak efektif. - (X = 100%), maka artinya efektivitas cukup berimbang. - (X > 100%), maka artinya efektif.

Sumber: (Kuncoro, 2020)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan produk akhir dari SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD (Nursamah, 2018). LAKIP merupakan salah satu sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada *stakeholder* dan evaluasi atas pencapaian kinerja instansi pemerintah (Inmas, 2017).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif ini biasanya berkaitan dengan pengkajian fenomena yang lebih rinci (Siyoto & Sodik, 2015). Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dikaji lebih rinci mengenai transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money* atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan kondisi dan data yang ada di lapangan. Peneliti telah menetapkan lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian ini yaitu Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara di Jalan Raya Gondang Bayan Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Prosedur Pengumpulan Data:

1. Observasi. Metode observasi adalah teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperlukan untuk penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.
2. Wawancara. Peneliti mewawancarai beberapa informan yaitu Kasubag Program dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara serta Auditor Inspektorat.

3. Dokumentasi. Dokumen yang dikumpulkan peneliti melalui dokumentasi yang perlu digunakan melalui data yang tersedia, berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan data yang diperlukan.

Sumber Data

1. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini berupa data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan pihak dari Dinas Perhubungan dan Inspektorat. Data Sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021.

Keabsahan Data

Pada penelitian ini untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini perlu dilakukan verifikasi keabsahan data yang digunakan. Metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan dua cara yaitu triangulasi dan *member check*. Triangulasi digunakan untuk membandingkan dan mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber yang dimana nanti akan dibandingkan dengan hasil pengamatan dengan wawancara dan dokumentasi. Sedang *member check* digunakan untuk mengkonfirmasi terkait data yang diberikan informan baik hasil wawancara maupun dokumentasi untuk memastikan kebenarannya.

Metode Analisis Data

Pada tahap awal penelitian ini dilakukan pengumpulan data melalui sumber data berupa dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), kemudian data tersebut diolah dan dihitung dengan menggunakan rasio guna mendapatkan gambaran mengenai kondisi kinerja keuangan. Hasil perhitungan rasio yang sudah diperoleh kemudian disusun dalam bentuk analisis deskriptif guna menjelaskan makna dari angka-angka yang diperoleh dari hasil perhitungan tersebut. Dalam hal ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode rasio *Value for Money* dengan membandingkan hasil dari perhitungan rasio terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021, kemudian dari perbandingan tersebut lalu diinterpretasikan maknanya. Sedangkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari informan melalui hasil wawancara di lapangan selanjutnya di deskripsikan dengan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data. Untuk data yang akan direduksi terkait hasil observasi, wawancara dan dokumentasi akan dipilih hal pokok sesuai dengan indikator yang digunakan terkait transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money* sehingga mudah disajikan nantinya.
2. Penyajian Data. Data yang telah direduksi terkait transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money* atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara dengan memperhatikan indikator yang digunakan sehingga didapat hasil yang sesuai.
3. Kesimpulan atau verifikasi. Setelah data disajikan akan diambil kesimpulan terkait transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money* pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara dengan memperhatikan indikator yang digunakan sehingga didapat hasil yang sesuai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan untuk dapat mengetahui bagaimana transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money* atas Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara. Hasil penelitian dipaparkan ke dalam beberapa indikator penelitian.

Transparansi Atas LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen. Pengamatan yang dilakukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara menemukan hasil bahwa terdapat banyak dokumen pengelolaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara baik dari rencana program dan kegiatan, laporan akuntabilitas kinerja, laporan capaian kinerja, laporan keuangan, dan laporan tahunan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang biasanya dilaporkan setiap tahun tepatnya pada akhir tahun. Tersedianya dokumen-dokumen terkait LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara dibarengi dengan adanya media yang digunakan oleh Dinas Perhubungan dalam mempublikasikan segala informasi terkait dokumentasi kegiatan maupun dokumen-dokumen terkait LAKIP.
2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi. Berdasarkan hasil wawancara bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara dalam menjamin kejelasan dan kelengkapan informasi bahwa yang disediakan dengan dokumen-dokumen dan membagikan dokumentasi kegiatan melalui sosial media, diperkuat dengan adanya laporan ke Inspektorat sebagai perwujudan pertanggungjawaban yang akan mereviu dan evaluasi dari LAKIP yang dilaporkan Dinas Perhubungan ke Inspektorat.
3. Keterbukaan Proses. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pernyataan yang diberikan Kasubag Program dan Keuangan beserta Bendahara Barang dan Pengeluaran sudah sejalan tentang bagaimana Dinas Perhubungan menerapkan prinsip keterbukaan dengan selalu terbuka memberikan informasi dengan datang langsung ke kantor jika ada pertanyaan dan adanya media untuk publish setiap kegiatan ditambah melakukan evaluasi setiap bulannya sebagai bentuk penyampaian perkembangan.

Akuntabilitas Atas LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. Dalam hal ini pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerjanya mengacu pada amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai acuan dalam penyusunannya
2. Akuntabilitas Proses. Berdasarkan hasil wawancara bahwa proses pembuatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pada Dinas Perhubungan setiap tahunnya pasti ada bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja yang biasanya setiap bulan ada evaluasi bulanan, triwulan dan per semester dari evaluasi tersebut. Kemudian dibuat dalam bentuk LAKIP yang utuh dan akan dilaporkan ke pihak Inspektorat setiap tahunnya pada akhir tahun untuk dievaluasi.
3. Akuntabilitas Program. Berdasarkan pemaparan diatas terkait pelaksanaan program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan setiap bagian memiliki program masing-masing atas anggaran yang ada. Dan sistem program dilaksanakan disesuaikan dengan visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih pada saat itu.
4. Akuntabilitas Kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kebijakan laporan pertanggungjawaban kinerja biasanya dilakukan setiap tahunnya tepatnya di akhir tahun. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara setiap akhir tahun melaporkan bentuk pertanggungjawaban kinerjanya ke Inspektorat.

Konsep *Value for Money* Atas LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara Tingkat Ekonomis

Tabel 2. Hasil Pengukuran Tingkat Ekonomis Pada Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021

No	Uraian Program dan Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Ekonomis
A	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	227.763.100	227.763.100	100%
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.285.031.626	1.283.786.458	99%
3	Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	92.105.000	92.105.000	100%
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	137.504.624	137.504.624	100%
5	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	185.350.200	183.219.500	99%
6	Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.191.200	34.191.200	100%
B	Program Pengelolaan Pelayaran			
1	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	131.672.400	131.672.400	100%
2	Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	198.913.800	198.913.800	100%
C	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.745.500	103.745.500	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.994.361.374	3.752.712.255	94%
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.025.355.017	1.928.567.036	95%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.041.100	118.041.100	100%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	7.779.000	7.779.000	100%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	361.425.000	361.425.000	100%

Sumber: LAKIP Dinas Perhubungan Kab. Lombok Utara 2021(Data diolah peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel di atas, pengukuran tingkat ekonomis pada tahun 2021 terdapat 3 program dan diantaranya terdapat 14 kegiatan yang terealisasi. Dari 14 kegiatan sebanyak 10 kegiatan memiliki nilai ekonomis sebesar 100% sedangkan 4 kegiatan memiliki nilai ekonomis dibawah 100%.

Tingkat Efisiensi

Tabel 3. Hasil Pengukuran Efisiensi pada Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021

No	Uraian Program dan Kegiatan	INPUT	OUTPUT	Tingkat Efisiensi
A	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			

1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	99%	75%	132%
3	Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	100%	100%
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	100%	100%
5	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	99%	100%	99%
6	Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
B	Program Pengelolaan Pelayaran			
1	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	100%	63.23%	63%
2	Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100%	87%	115%
C	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	94%	100%	94%
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	100%	95%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	100%	100%

Sumber: (LAKIP Dinas Perhubungan Kab. Lombok Utara, 2021 (Data diolah peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 8 kegiatan dengan nilai efisiensi sebesar 100%, dan terdapat 2 kegiatan dengan nilai efisiensi diatas 100%. Selain itu terdapat 4 kegiatan dengan nilai efisiensi dibawah 100%.

Tingkat Efektivitas

Tabel 4. Hasil Pengukuran Tingkat Efektivitas Pada Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021

No	Uraian Program dan Kegiatan	Capaian Target (%)	Fisik (%)	Tingkat Efektivitas
A	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	75%	68%	91%
3	Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	100%	100%
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	100%	100%
5	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	10%	100%
6	Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
B	Program Pengelolaan Pelayaran			

1	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	63.23%	53.84%	85%
2	Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	87%	85%	98%
C	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	100%	100%

Sumber: LAKIP Dinas Perhubungan Kab. Lombok Utara, 2021(Data diolah peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat terdapat 10 kegiatan dengan nilai efektivitas sebesar 100% dan terdapat 4 kegiatan dengan nilai efektivitas kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 dari 14 kegiatan terdapat 10 kegiatan memiliki hasil perhitungan efektivitas sebesar 100%.

Pembahasan

Penelitian ini didukung oleh Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang muncul ketika adanya hubungan kerjasama antara satu orang atau lebih, dimana pemilik memberi wewenang ke manajemen untuk bekerja dan mengelola sumber daya yang diberikan. Dalam penelitian ini pihak pengelola Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara dan pemangku kepentingan yakni Inspektorat yang bertugas memngevaluasi dan memberikan nilai terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja. Untuk hasil dari penelitian ini dijabarkan dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Transparansi Atas LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen. Pada Dinas Perhubungan Lombok Utara terdapat banyak sekali dokumen, termasuk dokumen program dan kegiatan masing-masing bagian atau bidang melalui media sosial seperti *Facebook*. Dokumen LAKIP tentunya beserta dokumen penunjang lainnya. Adanya dokumen-dokumen yang telah tersedia bisa diakses langsung melalui beberapa media berupa website Esr.menpan.go.id dan ppid.lombokutarakab.go.id
2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi. Dinas Perhubungan dalam menjamin bahwa informasi yang disediakan telah jelas dan lengkap yakni dengan cara menyediakan media untuk diakses dan dipantau pihak luar maupun menyelenggarakan rapat bulanan sebagai bahan evaluasi dalam perkembangan maupun kendala yang dihadapi, sehingga diharapkan informasi dan laporan yang dimuat jelas dan lengkap sebelum dilaporkan ke Pemerintah Daerah dalam hal ini yaitu Inspektorat bertugas sebagai pengawas sekaligus mengevaluasi dan memberi penilaian terhadap laporan akuntabilitas kinerjanya selama satu tahun berjalan.
3. Keterbukaan Proses. Segala bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara diinformasikan ke Inspektorat umumnya dilaporkan tiap tahun tepatnya di akhir tahun. Pada saat laporan tersebut disampaikan segala proses yang telah dijalani oleh Dinas Perhubungan termasuk program-program yang telah berjalan, anggaran yang digunakan dan lainnya.

Akuntabilitas Atas LLAKIP Dinas Perhubungan Kabupten Lombok Utara

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. Dalam hal ini pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerjanya mengacu pada amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai acuan dalam penyusunannya agar laporan yang dibuat sudah sesuai sumber-sumber yang ada sehingga tidak ada kesalahpahaman
2. Akuntabilitas Proses. Pada Dinas Perhubungan proses dan penyusunan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Proses penyusunannya bertahap mulai dari setiap bagian untuk melaporkan kinerjanya kemudian dihimpun pada bidang sub bagian program dan keuangan untuk dijadikan satu agar menjadi satu kesatuan laporan yang utuh.
3. Akuntabilitas Program. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara setiap program dan kegiatannya harus tiap tahunnya dilaksanakan dan setiap bagian harus memiliki program atas anggaran yang ada. pelaksanaan program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan setiap bagian memiliki program masing-masing atas anggaran yang ada. Dan sistem program dilaksanakan disesuaikan dengan visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih pada saat itu.
4. Akuntabilitas Kebijakan. Kebijakan dari pemerintah daerah bahwa setiap tahunnya setiap Organisasi perangkat Daerah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban kinerja atas tugas penyelenggaraan otonomi daerah. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara juga setiap tahun melaksanakan tugas dengan selalu melaporkan bentuk pertanggung jawabannya ke Inspektorat.

Konsep Value for Money Atas LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara

1. Ekonomis. Dari 14 kegiatan tersebut sebanyak 4 kegiatan memiliki hasil perhitungan ekonomis dibawah 100%. Berdasarkan kriteria ekonomis, maka 4 kegiatan ini dinyatakan ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara tidak melakukan penghematan pengeluaran dari anggaran yang telah ditetapkan pada 14 kegiatan tersebut. Selain itu, terdapat 10 kegiatan lainnya memiliki nilai perhitungan ekonomis sebesar 100%. Berdasarkan pada kriteria ekonomis, maka 10 kegiatan ini dinyatakan ekonomis berimbang. Ini menunjukkan bahwa dana yang dikeluarkan pada 10 kegiatan ini sama dengan jumlah anggaran yang telah direncanakan tersebut.
2. Efisiensi. Terdapat 2 kegiatan memiliki hasil perhitungan efisiensi diatas 100%. Berdasarkan pada kriteria efisiensi, maka 2 kegiatan ini dinyatakan efisien. Hal ini berarti bahwa persentase fisik yang telah dihasilkan pada 2 kegiatan tersebut melebihi persentase keuangan yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian terdapat 8 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efisiensi sama dengan 100%. Berdasarkan pada kriteria efisiensi, maka 8 kegiatan ini dinyatakan efisien berimbang. Ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang telah dihasilkan pada 8 kegiatan tersebut sama dengan persentase keuangan yang telah dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Selain itu, terdapat 4 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efisiensi dibawah 100%. Berdasarkan kriteria efisiensi maka 4 kegiatan ini untuk persentase fisiknya kurang dari persentase keuangan yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
3. Efektivitas. Dari 14 kegiatan terdapat 10 kegiatan memiliki hasil perhitungan efektivitas sebesar 100%. Berdasarkan pada kriteria efektivitas, maka 10 kegiatan ini dinyatakan

efektivitas berimbang. Hal ini berarti realisasi hasil pada 10 kegiatan ini sama dengan ekspektasi hasil fisik yang diinginkan objek. Kemudian terdapat 4 kegiatan lainnya yang memiliki nilai perhitungan efektivitas dibawah 100%. Berdasarkan kriteria efektivitas, maka 4 kegiatan ini dinyatakan tidak efektif. Ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang telah dihasilkan pada 4 kegiatan tersebut tidak mencapai ekspektasi hasil realisasi yang diinginkan objek.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara bisa dikatakan sudah menerapkan prinsip transparansi dengan adanya keterbukaan informasi dan akuntabilitasterhadap publik dan pemerintah sesuai aturan. Sedangkan analisis dengan metode *value for money* yang meliputi pengukuran ekonomis, efisiensi dan efektivitas dengan ini peneliti menyimpulkan belum ada kegiatan yang mencapai nilai efektivitas diatas 100%. Meskipun hampir semua kegiatan telah ekonomis dan efisiensi tetapi banyak kegiatan yang dinilai belum efektif. Dapat disimpulkan bahwa pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 belum memenuhi prinsip *value for money*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, H. (2021). *Analisa Kesejahteraan Sosial kabupaten Lombok Utara*.
- Inmas, S. (2017). *LAKIP sebagai sarana evaluasi kinerja dan akuntabilitas*. <https://jateng.kemenag.go.id/Berita/Lakip-Sebagai-Sarana-Evaluasi-Kinerja-Dan-Akuntabilitas/>.
- Ismail. (2018). *Pertanggungjawaban Publik Akuntansi Sektor Publik*. <http://www.slideshare.net/Ismailm16/Pertanggungjawaban-Publikakuntansi-Sektor-Publik>.
- Iswahyudi, A., Triyuwono, I., & Achsin, M. (2016). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money dan Good Governance (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 151–166.
- Kuncoro. (2020). *Value for Money, Definisi, Manfaat, Indikator*.
- LAKIP Dinas Perhubungan Kab. Lombok Utara. (2021). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara*.
- Laoli, V., Si, M., Sekolah, A., Ilmu, T., Pembangunan, E., Stie, N. (, & Nasional, P. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Nias. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 3.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (ed.); Terbaru). ANDI.
- Nursamah. (2018). *LAKIP dan Penilaian SAKIP Tolak Ukur Kinerja PNS*. <https://www.kkptanjungpriok.net/Informasi/Info-Publik/Berita/Berita-Umum/Item/749-Lakip-Dan-Penilaian-Sakip-Tolak-Ukur-Kinerja-Pns>.
- Purnomo, B. S., & Putri, C. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 467–476. <https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14886>
- Rahayu, R., Makmur, M., & Setyowati, E. (2017). Kinerja Bappeda Kabupaten Banyuwangi dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); (Studi di Bappeda Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 36–41.
- Santoso, S. (2013). Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 1, 160–170.

- Shara, Y., Ovami, D. C., & Humairah, R. (2020). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value For Money Padarsud Djoelham Binjai. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 13–17. <https://journal.fkpt.org/index.php/jtear>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. In *Literasi Media Publishing*.
- Trimarstuti, J. (2019). *Transparansi dan Akuntabilitass Publik melalui Publik Akuntansi Sektor: Penggunaan "Value For Money" Konsep di Indonesia*.
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>